

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adisasmita, Rahardjo, 2011. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Garaha Ilmu, Yogyakarta
- Aminanto, Kif, 2018. *Bunga Rampai Hukum. Supremasi Hukum, Hak Cipta, Human Right, Integritas*. Jember Katamedia
- Arenawati, 2016. *Administrasi Pemerintah Daerah : Sejarah, Konsep, dan Penatalaksanaan di Indonesia*. Garaha Ilmu, Yogyakarta
- Azhary, 1995. *Negara Hukum Indonesia*. Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta
- Fahrudin, Adi, 2018. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. PT. Refika Aditama, Bandung
- Fauzan, Muhammad, 2006. *Hukum Pemerintah Daerah, Kajian tentang Hubungan Keuangan antara Pusat & Daerah*. UII Press, Yogyakarta
- Fuady, Munir, 2009. *Teori Negara Hukum Modern*. PT. Refika Aditama, Bandung
- Halim, Abdul, 2002. *Akuntansi dan Pengendalian Keuangan Daerah, Seri Bunga Rampai Manajmen Keuangan Daerah*. UPT STIM YKPN, Yogyakarta
- Halim, Abdul, 2017. *Akuntansi dan Pengendalian Keuangan Daerah*. UPT STIM YKPN, Yogyakarta
- Hamid, Abdul, 2016. *Teori Negara Hukum Modern*. CV. Pustaka Setia, Bandung
- Hariadi, Pramono dkk, 2010. *Penegelolaan Keuangan Daerah*. Salemba Empat, Jakarta
- HR, Ridwan, 2018. *Hukum Administrasi Negara*. PT. Rajagrafindo Persada, Depok
- Huda, Ni'matul, 2014. *Ilmu Negara*. PT. Rajagrafindo Persada, Depok
- Ilyas, Wirawan B dan Richard Burton, 2010. *Hukum Pajak*. Salemba Empat, Jakarta

- Kaho, Jisef Riwu, 2005. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. PT. Rajagrafindo Persada, Depok
- Karianga, Hendra, 2015. *Politik Hukum Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*. Prenadamedia Group, Jakarta
- Martosuwarnjo, Sri Soemantri, 2015. *Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran dan Pandangan*. PT Remaja Rosdakarya, Bandung
- Marzuki, Peter Mahmud, 2017. *Penelitian Hukum*. Kencana, Jakarta
- MD Mahfud, 2003. *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*. PT Rineka Cipta, Jakarta
- Puspitosari, Hesti dkk, 2012. *Filosofi Pelayan Publik*. Setara Press, Malang
- Palguna, I D.G, 2019. *Welfare State Vs Globalisasi*. PT. Rajagrafindo Persada, Depok
- Rahadiansyah, Emil dkk, 2014. *Menuju Politik Anggaran Berbasis Kinerja*. Paramadina Public Policy Institute
- Rahayu, Ani Sri, 2018. *Pemerintahan Daerah, Kajian Teori, Hukum dan Aplikasinya*. Sinar Grafika, Jakarta
- Rosidin, Utang, 2015. *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*. Pustaka Setia, Bandung
- Saebani, Beni Ahmad dan Ai Wati, 2016. *Perbandingan Hukum Tata Negara*. CV. Pustaka Setia, Bandung
- Saidi, Muhammad Djafar, 2010. *Pembaruan Hukum Pajak*. PT. Rajagrafindo Persada, Depok
- Saidi, Muhammad Djafar dkk, 2017. *Hukum Keuangan Negara*. PT. Rajagrafindo Persada, Depok
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2016. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. PT. Rajagrafindo Persada, Depok
- Sarja, 2016. *Negara Hukum Teori dan Praktek*. Thafa Media, Yogyakarta
- Siregar, Baldrick dan Bonni Siregar, 2001. *Akuntansi Pemerintahan dengan Sistem Dana*. STIE YKPN, Yogyakarta

Soetomo, 2014. *Kesejahteraan dan Upaya Mewujudkannya dalam Perspektif Masyarakat Lokal*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Syafiie, Inu Kencana, 2017. *Ilmu Pemerintahan*. PT. Bumi Aksara, Jakarta

Syaukani, Imam dan A. Ahsin Thohari, 2015. *Dasar-Dasar Politik Hukum*. PT. Rajagrafindo Persada, Depok

Tuanaya, Wance dan Marno Wance, 2020. *Politik Anggaran, Dinamika Legislasi, Komunikasi Politik, Perencanaan Anggaran, dan Proyeksi Pembuatan APBD*. Manggu Makmur Tanjung Lestari, Bandung

Widjaja, HAW, 2002. *Otonomi Daerah dan Daerah otonom*. PT. Rajagrafindo Persada, Depok

B. Jurnal

Arif Hidayat, Analisis Politik Hukum Partisipasi Masyarakat dalam Sistem Penganggaran Daerah di Indonesia Pasca Reformasi, Jurnal Pandecta, Volume 6, Nomor 1, Januari 2011

Lily Latul, Inovasi Pembinaan dan Pengawasan dalam Pencapaian Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Jurnal Studi Inovasi, Volume 1, Nomor 3, 2021

Megawati, Analisis Hubungan Eksekutif dan Legislatif dalam Pembuatan Perda APBD di Provinsi Sulawesi Barat, Government : Jurnal Ilmu Pemerintahan, Volume 11, Nomor 2, Juli 2018

Mukti, Politik Hukum Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Jurnal Fak Hukum UMI, Volume 20, Nomor 2, November 2018

Rahmat Tantowi, Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sebagai Strategi Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik, Jurnal Samudra Ekonomika, Vol. 3, No.2 2019

Rialdo Putra, Tinjauan Yuridis Terhadap Penyusunan APBD Kota Pekanbaru Tahun 2015, JOM Fakultas Hukum, Volume III Nomor 2 Oktober 2016

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 2011

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2015 Tentang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penjabat Sekretaris Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten dan Kota

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Banyumas Tahun 2020

Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Banyumas Tahun 2021

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Banyumas Tahun 2021